

**JURNAL**  
**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN**  
**RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010-2011**

Oleh :  
**Istiqomah**  
**0501120676**

**Dosen Pembimbing**  
**Dra. Wan Asrida, MSi**  
**NIP. 196105131987102001**

**Abstrac :**

This paper discusses the wheather program it had and not happened on the empowerment of women in the district of Lower Rambah Rokan Hulu. The extent of women's participation in the program and the involvement of women in social life and also the room is the scope of the institution. A variety of things that affect the success rate of the program and also barriers to be presented in this paper. Among these constraints is the lack of effective program presented due to lack of innovative programs, and the lack of facilities and infrastructure that support. Besides the work of the executive prifesionalitas program itself become an obstacle to the achievement of women's empowerment program.

Keywords: *Policies, Empowerment and Gender*

**A. PENDAHULUAN**

Masalah partisipasi perempuan dalam kelembagaan negara merupakan hal yang selalu menjadi perbincangan disetiap kalangan. Seiring dengan perkembangan demokrasi yang terjadi diberbagai negara, terutama dinegara-negara yang sedang berkembang, sudah seharusnya hal itu menjdi pendorong bagi kaum perempuan untuk semakin aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu pemerintah memngeluarkan adanya program pemberdayaan perempuan untuk lebih meningkatkan kualitas untuk dapat setara dalam kehidupan bernegara.

Kaum perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memainkan peranan yang lebih besar dan ikut memajukan pembangunan disegala bidang serta menjadi pemimpin dalam organisasi, padahal kita tahu bahwa potensi perempuan perlu diberdayakan. Seperti program

Pemberdayaan berkelanjutan dua tahun terakhir ini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yakni masih rendahnya peranan dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bernegara.

Mengapa program-program pemerintah dalam pengembangan masyarakat jarang yang serius memperhatikan kepentingan perempuan? Jawabannya dapat digali dari dalam masyarakat itu sendiri serta dari lembaga yang terkait dengan kepentingan perempuan. Baik itu lembaga yang internal maupun lembaga eksternal. Pada umumnya kaum laki-laki dalam masyarakat masih banyak yang berfikir bahwa perempuan sebaiknya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Sehingga ada anggapan bahwa lingkup gerak perempuan lebih bersifat pribadi didalam rumah.

Lembaga-lembaga pembangunan eksternal juga ikut bertanggung jawab pada tingkat pembuatan desain, kebanyakan program pembangunan pemerintah dan banyak program LSM (Lembaga swadaya masyarakat) tidak mengikutsertakan perempuan secara maksimal. Pada tingkat pelaksanaan perempuan tidak memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara itu informasi tentang peluang dalam program pembangunan dimonopoli oleh kaum laki-laki. Untuk mengejar ketertinggalan diberbagai bidang kehidupan, negara-negara berkembang seyogyanya mengarahkan seluruh sumber daya manusia seoptimal mungkin karena selama ini tidak jarang terdapat negara yang mengabaikan potensi sumber daya perempuan karena mereka dianggap kurang potensial untuk ikut berprestasi dalam membangun kehidupan masyarakat.

Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau yang patut diperhitungkan. Dimana dalam hal ini Kecamatan Rambah Hilir salah satu kecamatan yang memiliki sumber daya alam yang paling tinggi di Kabupaten Rokan Hulu, namun jika dilihat dari Sumber Daya Manusia yang ada, Kecamatan Rambah Hilir masih tergolong tertinggal jauh dari kecamatan-kecamatan lain terutama sekali sumber daya perempuannya. Dari penelitian yang penulis lakukan, kaum perempuan di Kecamatan Rambah Hilir masih jauh tertinggal diberbagai aspek kehidupan dibanding dengan kaum laki-lakinya.

Dalam bidang politik kemampuan perempuan di Kabupaten Rokan Hulu masih tergolong rendah. Terutama disalah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rambah hilir merupakan salah satu kecamatan yang peran perempuannya masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan tampaknya posisi perempuan dalam bidang pengambilan

keputusan, baik legislatif maupun yudikatif masih didominasi kaum laki-laki, karena perempuan yang terlibat dalam posisi sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) masih sedikit sehingga banyak keputusan yang diambil tidak memihak kepada perempuan.

Dalam bidang ekonomi, perempuan belum bisa mengatur putaran uang yang mereka peroleh dari berbagai usaha. Dari berbagai bidang usaha yang ada mulai dari usaha yang bersifat kecil sampai yang berskala besar semuanya didominasi oleh kaum laki-laki. Berikut tabel yang menjelaskan tingkatan profesi antara perempuan dan laki-laki di kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1.1. Jenis Usaha dan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011

No	Bidang Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Pertanian	Pemilik, Pekerja	Pemilik, Pekerja	3259	1283
2	Perkebunan	Pemilik, Pekerja, Bagi Hasil	Pekerja	4332	2478
3	Industri	Pemilik, Pekerja	Pemilik, Pekerja	675	445
4	Konstruksi	Pemilik, Pekerja	Pemilik, Pekerja	325	135
5	Transportasi dan Komunikasi	Usaha sendiri, Pekerja	Pemilik, Pekerja	421	123
6	Perdagangan	Pemilik, Pekerja	Pemilik, Pekerja	1352	1970
7	Jasa	Pemilik, Pekerja	Pemilik, Pekerja	307	535
8	Lainnya			1865	724
				12.536	7693

Sumber : BPS, Sakernas 2011

Dalam bidang kesehatan dari sekian banyak perempuan yang ada sebagian kecil yang sudah menempuh pendidikan Sekolah Menengah karena dalam masyarakat masih tertanam dengan kuat persepsi yang menyatakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena posisi perempuan nantinya hanya akan berada dilingkungan rumah tangga, anggapan ini terus berkembang karena didukung oleh adanya para perempuan yang telah menempuh jenjang pendidikan diatas rata-rata (SMA-S1) tetapi mereka hanya bergerak sebagai ibu rumah tangga dan walaupun bekerja mereka hanya akan lebih condong untuk menjadi seorang pelayan atau pegawai sebuah mini market atau diberbagai PT yang mana mereka akan sejajar dengan perempuan yang berpendidikan rendah.

Faktor sosial budaya sangat penting karena mempengaruhi status dan peranan perempuan. Sosial budaya dapat menunjang sekaligus menghambat kemajuan perempuan. Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 berdampak cukup signifikan terhadap kemampuan para orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Dalam hal ini para orang tua lebih cenderung memilih anak laki-laki mereka dibanding anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga kemampuan perempuan menjadi terbatas. Hal ini dilakukan karena mereka (orang tua) menganggap laki-laki lebih mempunyai tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya kelak, sehingga prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan bagi anak laki-laki mereka.

Pada hakekatnya sasaran program pembangunan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan dan memungkinkan dirinya memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Dan hal itu ditentukan oleh usaha dan sumber daya yang dimiliki kaum perempuan itu sendiri.

## **B. PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU**

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu nomor 30 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan masyarakat, pasal 32 bahwa Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Subbagian Pembinaan Organisasi Wanita
- b. Subbagian Penyuluhan dan Pemberdayaan SDM

Selanjutnya dalam pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa Sub Bagian Pembinaan Organisasi Wanita mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan Organisasi Wanita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa Subbagian Penyuluhan dan Pemberdayaan SDM mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang penyuluhan dan pemberdayaan SDM Wanita, mencakup pengarusutamaan gender, keadilan, penghapusan kekerasan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan yang bersifat multidimensional dan lintas sektoral yang dilakukan secara terpadu, partisipatif, kontiniu, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah dengan memperhatikan lingkungan sosial budaya.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dalam buku Mengatasi Kesenjangan Gender (2002:50) program-program tersebut dikembangkan dalam rangka enam misi pemberdayaan perempuan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang strategis
- b. Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender
- c. Penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan
- d. Penegakkan Hak Asasi Manusia
- e. Pemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan
- f. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Dengan melihat program-program pemberdayaan perempuan diatas, maka pemerintah kabupaten Rokan Hulu mengenalkan program-program kerjanya yang diharapkan dengan program-program tersebut dapat membantu program pemberdayaan perempuan dan hal itu terlihat dengan adanya suatu Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (BPPDKB) dan Sub Bagian pada Badan Pemberdayaan tersebut terdapat Bagian Kepengurusan Pemberdayaaan Perempuan.

Adapun program kegiatan pemberdayaan pada bagian Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kecamatan Rambah Hilir dua tahun terakhir yakni dari tahun 2010-2011 adalah seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3. Program Pemberdayaan Pada Bagian Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Rambah Hilir dua tahun terakhir (2010-2011)

No	Tahun	Program	Kegiatan	Lokasi	Jumlah orang yang mengikuti program
1	2010	-Operasional pembuatan anyaman tikar	- Pelatihan remaja putri putus sekolah	Rambah Hilir	30
			-Pelatihan manajemen pengurus gerakan organisasi wanita		45
		-Pembinaan peran wanita	- Kesetaraan dan keadilan gender	Rambah Hilir	30
			- Peningkatan peranan wanita		30
			-Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga		58
-Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	63				
2	2011	-Peningkatan kesejahteraan ibu dan anak	- Bina keluarga balita (BKB) dan Gerakan sayang ibu (GSI)	Rambah Hilir	38
			- Sosialisasi gerakan sayang ibu		45
		-Peningkatan Kesejahteraan ibu dan anak	- Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi produktif wanita	Rambah Hilir	39
			- Peningkatan kualitas SDM perempuan		20
		-Peningkatan peranan wanita keluarga sehat sehat sejahtera (P2WKSS)	Rambah Hilir	45	
			441		

Sumber :Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Kecamatan dan Keluarga Berencana(BPPDKB) Kabupaten Rokan Hulu

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, analisa permasalahan, dan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu kurang baik. Hal itu ditandai dengan kurang tepatnya sasaran program yang dilakukan. indikator variabel yang dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan program pemberdayaan perempuan salah satunya seperti pembinaan organisasi perempuan rata-rata dilakukan kurang dari 3 kali setiap tahunnya.

kegiatan yang ada terkendala dengan kurangnya tenaga ahli yang menjadi pelaksana sekaligus pendukung tercapainya sasaran program, selain itu kurangnya sarana dan prasarana juga dikeluhkan juga oleh para pelaksana itu sendiri sehingga merekapun tidak dapat bekerja secara maksimal. Bantuan fasilitas yang masih sangat minim serta kelembagaan yang mendukungpun terbatas menjadikan program ini hanya sebagai program tahunan semata saja tanpa ada menunjukkan perkembangan yang berarti. pelaksana program juga harus memiliki metode yang lebih menarik lagi untuk mendorong para perempuan untuk menjadikan dirinya berkualitas dan produktif. selain itu bukan tidak mungkin selayaknya pada bagian pemberdayaan perempuan yang berada diruang lingkup Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana(BPPDKB) memiliki lembaga tersendiri yang berarti nantinya kegiatan terfokus hanya pada peningkatan dan perkembangan dalam hal pemberdayaan perempuan. dengan demikian secara otomatis terdapat anggaran tersendiri pada lembaga pemberdayaan perempuan itu, dengan demikian hal itu akan mempercepat langkah pelaksanaan program pemberdayaan tanpa harus terkendala lagi kurangnya sarana dan prasarana dan segala hambatan-hambatan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour.1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Irfan, Muhamamad. 1991, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan*. Rajawali Press, Jakarta

Google.www.co.id.Kartasasmita. Tentang Upaya Pemberdayaan Perempuan

Google.www.co.id.Melly G Tan. Tentang konsep Pemberdayaan

Sadli, Sapparinah. 1996. *Perempuan Indonesia, Dulu dan Kini*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta